

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. 2001. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Husein, M. Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komarudin. 2004. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Ilmar, Aminuddin. 2007. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexi Johannes. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moch. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oxford Advanced Learner's. 2002. *Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press.
- Poerwadarminto, W. J. S. 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV.Rajawali.

Soesilo, R. 1997. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politeia.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Prizinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrin, Alvi. 2003. *Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No : HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemem Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.00847 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, Dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019.

c. Jurnal

Sukarjono, Bambang. 2008. *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. Malang: Jurnal Sosial, Vol. 9 No. 2, September 2008, Politeknik Negeri Malang.

d. Website

<http://www.kamusbahasaIndonesia.org.>, diakses tanggal 7 Maret 2015.

